

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

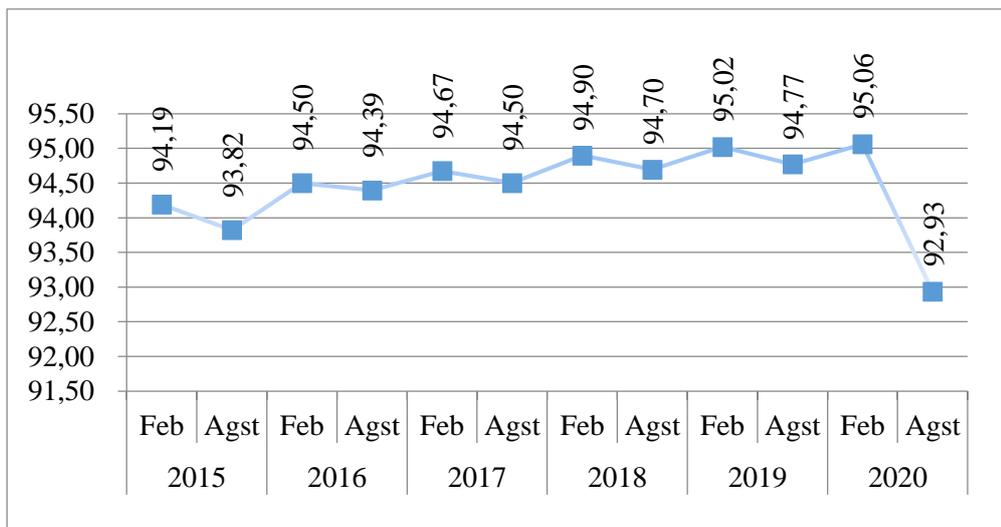
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita riil penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan kesadaran akan nilai masyarakat sebagai manusia dan meningkatkan kemampuan untuk memilih yang menjadi salah satu dari hak asasi manusia yang mendasar (Todaro & Smith, 2006).

Awal tahun 1970, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi dimana mulai muncul perspektif baru. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi tidak lagi memfokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada bagaimana mengatasi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dengan perekonomian yang terus berkembang. Hal ini didukung oleh pendapat para ekonom bahwa pertumbuhan yang dijelaskan oleh kenaikan produk nasional bruto tahunan tidak dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut (Arsyad, 2010).

Secara umum kesempatan kerja mencerminkan kondisi jumlah total tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan perekonomian. Tersedianya kesempatan kerja harus berkualitas agar pekerja dan keluarganya dapat memperoleh penghasilan yang dapat menjamin kehidupan yang layak. Kesempatan kerja yang luas diharapkan dapat menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan produktivitas penduduk dan meningkatkan produksi serta pendapatan nasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Kindangen & Tumiwa, 2015).

Kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang berkaitan, kesempatan kerja diwakili oleh jumlah orang yang bekerja, dan kesejahteraan masyarakat diwakili oleh peran masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Awandari, 2016). Ketidaksesuaian penawaran

dan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja dapat menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang terus-menerus. Hal ini terjadi ketika penawaran tenaga kerja lebih besar daripada dengan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang rendah menyebabkan pengangguran karena kelebihan pekerja yang menawarkan pekerjaan (Pramusinto *et al.*, 2019). Berikut gambar 1 yang menunjukkan kondisi kesempatan kerja di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 1. Kesempatan Kerja di Indonesia Berdasarkan Semester

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan kesempatan kerja di Indonesia dari tahun 2015 - 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Tenaga kerja sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Dalam pertumbuhan ekonomi kegiatan produksi yang meningkat secara bersamaan dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Terserapnya penduduk yang bekerja disebabkan karena adanya permintaan akan tenaga kerja. Penduduk Indonesia yang besar perlu memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya dan dapat menyerap penduduk yang ada ke dalam semua kegiatan di sektor ekonomi. (Afiat, 2018).

Sektor primer terbagi menjadi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dengan penggalian. Indonesia merupakan negara agraris, dan kontribusi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja relatif tinggi. Perubahan struktur ekonomi merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan sektor termasuk pembangunan sumber daya manusia. Seiring dengan itu, perubahan struktural nasional yang berpusat pada sektor pertanian mulai bergeser ke sektor industri dan jasa. Studi empiris oleh Effendi (2014) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto sektor primer berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa bahan tambang dan galian serta sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto daerah.

Menurut Arsyad (2010), pembangunan industri sebagai suatu fungsi dari tujuan utama kesejahteraan masyarakat, tidak hanya merupakan kegiatan mandiri yang bertujuan untuk mencapai tujuan fisik, tetapi sektor ini memimpin sektor-sektor ekonomi lainnya dalam suatu perekonomian. Proses industrialisasi sebagai penyedia lapangan kerja yang digunakan untuk membuka kesempatan kerja tambahan, namun pertumbuhannya lebih lambat dari pertumbuhan angkatan kerja. Sektor sekunder terbagi menjadi industri pengolahan, industri pengadaan listrik dan gas, industri pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta industri konstruksi.

Menurut studi empiris Effendi (2014), Produk Domestik Regional Bruto sektor sekunder berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan. Tingkat kontribusi pekerjaan rata-rata tahunan untuk sektor ini sebesar 8,5 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purwasih (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor industri berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo, ketika jumlah perusahaan di sektor industri meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2015, maka akan diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Hal ini dikarenakan investasi

mengalami kemajuan pesat seiring dengan bertambahnya jumlah industri yang sudah mapan.

Hal ini tidak sesuai dengan hasil temuan Idris (2014) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kesempatan kerja di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo Provinsi Jambi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan. Namun pada kenyataannya, beberapa daerah tidak memenuhi harapan karena pembangunan yang sedang berlangsung.

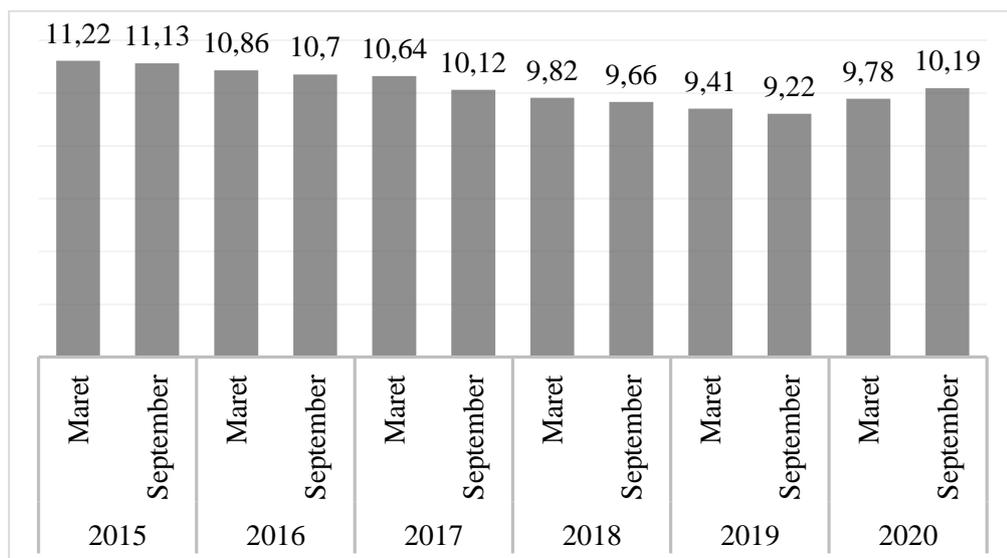
Sektor tersier terbagi atas sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya. Studi empiris oleh Effendi (2014) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto sektor tersier berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan. Perekonomian di Sumatera Selatan masih bertumpu pada sektor-sektor tradisional, namun telah terjadi pergeseran struktural perekonomian menuju kearah perekonomian modern dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dengan adanya peningkatan sektor tersier dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di Sumatera Selatan.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Pratiwi *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak berkualitas sehingga tidak mampu memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah ditunjukkan oleh penyerapan tenaga kerja yang relatif lamban lambat kenaikannya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud, dan lebih banyak kesempatan kerja

akan tercipta serta lebih banyak pekerja akan diserap pada tingkat upah yang sesuai.

Kemiskinan sebagai salah satu faktor penghambat pada proses pembangunan ekonomi. Indonesia termasuk negara berkembang yang berpendapatan menengah kebawah sehingga tidak lepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai keadaan ketidakmampuan individu atau keluarga dalam mencukupi kebutuhan standar hidup minimum. Selain itu, kemiskinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait masalah pembangunan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak merasakan manfaat dari proses pembangunan yang dihasilkan (Arsyad, 2010).

Persentase penduduk miskin atau *Head Count Index* (HCI-P0) merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. *Head count index* digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase penduduk yang tergolong miskin. Angka yang ditunjukkan oleh indeks penduduk menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu daerah, rasio yang tinggi artinya proporsi rumah tangga miskin di suatu daerah juga tinggi (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi persentase penduduk miskin di Indonesia dapat diketahui melalui gambar sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Semester

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 sampai dengan September 2019 mengalami penurunan yang baik hingga dapat menyentuh angka 1 digit. Ini menunjukkan pembangunan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat di realisasikan dengan baik. Salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupaya untuk mengakhiri siklus kemiskinan di kalangan penduduk termiskin. Namun, pada tahun 2020 angka kemiskinan mengalami peningkatan dua digit, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang menurunkan produktivitas dari setiap sektor lapangan usaha.

Studi empiris Ginantie (2016) menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor dominan yang mampu menyerap tenaga kerja di Jawa Timur. Sehingga dengan tumbuhnya sektor primer membuat taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pertanian akan membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Pendapat tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Nadhifa (2018) yang menegaskan bahwa sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, yaitu jika sektor pertanian meningkat sebesar 1 persen maka angka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.48 persen. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan yang muncul di sektor pertanian. Salah satunya terkait dengan semakin menyempitnya lahan pertanian, yang disebabkan oleh semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian, rendahnya harga jual produk, terbatasnya faktor produksi, dan lain-lain.

Sementara dalam penelitian Paran, *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa sektor primer tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat. Sektor ini memiliki teknologi rata-rata yang rendah dan mayoritas penduduknya bertani, yang akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja

dengan keterampilan tinggi. Selain itu, sektor ini bukan satu-satunya sektor mempengaruhi kemiskinan.

Studi empiris Silastri (2017) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto maka akan semakin tinggi pula permintaan dan pengeluaran secara keseluruhan sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat karena bertambahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pendapat tersebut tidak sejalan dengan temuan Nadhifa (2018) menunjukkan bahwa sektor industri tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan adanya standar kualifikasi tenaga kerja di bidang industri yang mempersulit masyarakat miskin untuk masuk ke sektor tersebut, terutama di bidang pendidikan dan keterampilan dan hanya golongan masyarakat tertentu yang dapat menikmati hasil dari peningkatan industri tersebut. Oleh karena itu, perkembangan sektor industri tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan angka kemiskinan di Jawa Timur. Sejalan dalam temuan Paran, *et al.* (2019) menunjukkan bahwa sektor sekunder tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di daerah Kutai Barat sehingga daerah tersebut tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan karena pemerintah belum mampu mengembangkan daerah tersebut dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, karena investasi swasta tidak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat wilayah kabupaten.

Studi empiris Suropto & Subayil (2020) menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan di Yogyakarta. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor potensial, akan terjadi pemerataan pendapatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo *et al* (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Timur. Hal ini

karena peningkatan kesejahteraan melalui daya beli atau kemampuan konsumsi masyarakat dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

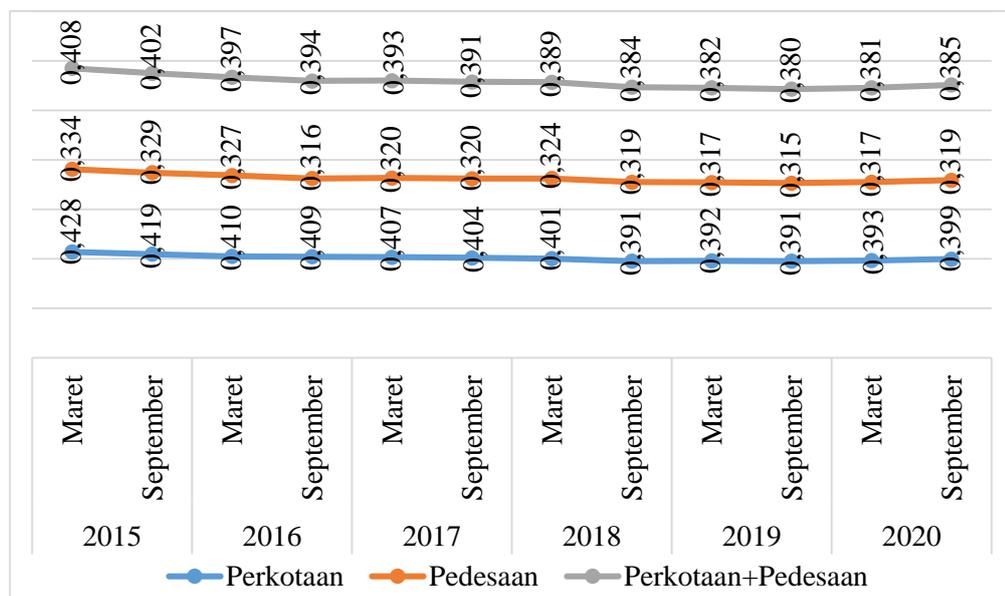
Perdapat tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Yuniati & Suryati (2018) yang mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 10,7 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dikarenakan pemerataan hasil pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto secara adil dan merata dari belum dirasakan secara jelas oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut pandangan tradisional, jika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka masalah seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran akan dengan mudah diselesaikan melalui strategi *trickle-down effect* (Kuncoro, 1997). *Trickle-down effect* adalah kegiatan ekonomi sehingga memiliki efek yang lebih besar pada kegiatan ekonomi yang mendasarinya ke tingkat yang lebih kecil. Namun pada kenyataannya, terjadi *trickle-up effect* dimana orang kaya cenderung mampu secara ekonomi tetapi lupa membangun ekonomi kecil di bawahnya. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin seiring dengan pertumbuhan distribusi yang menguntungkan kelas atas (Nadya & Syafri, 2019).

Menurut Bank Dunia, ada kriteria derajat ketimpangan pendapatan yaitu jika pengeluaran 40 persen penduduk terendah dibawah 12 persen, dikatakan ketimpangan tinggi, jika pengeluaran di 40 persen terendah penduduknya antara 12 sampai dengan 17 persen maka dikatakan memiliki ketimpangan sedang dan jika pengeluaran penduduk 40 persen terbawah lebih tinggi sebesar 17 persen artinya terjadi ketimpangan rendah (Badan Pusat Statistik, 2021).

Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai distribusi pendapatan yang tidak merata antar kelompok masyarakat di suatu wilayah yang dapat diukur menggunakan indeks gini. Indeks gini adalah koefisien yang mengukur ketimpangan secara keseluruhan dan nilainya berkisar antara angka 0 sampai

1. Dimana koefisien tersebut menunjukkan derajat pemerataan dan/atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Koefisien yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata atau disebut pemerataan sempurna, sedangkan koefisien 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata atau disebut ketimpangan sempurna (Arsyad, 2010). Berikut merupakan grafik gini rasio untuk mengetahui kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3. Gini Rasio di Indonesia Berdasarkan Semester

Secara nasional, nilai *Gini Ratio* Indonesia mengalami penurunan selama periode Maret 2015 sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan di Indonesia. Namun, pada maret 2020 nilai *Gini Ratio* mengalami kenaikan akibat adanya pandemi Covid-19. Meningkatnya indeks gini terjadi karena adanya perbedaan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah yang akan semakin menyulitkan akses bagi penduduk miskin.

Studi empiris oleh Udhar (2020), Syahri & Gustiara (2020) menunjukkan bahwa sektor primer berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula pendapatan per kapita masyarakat dan

akan menimbulkan kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin serta merupakan *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di suatu wilayah.

Sementara dalam penelitian Sutiono & Syafitri (2018) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, hal ini karena petani menciptakan nilai tambah yang rendah untuk produk pertaniannya. Sebagian besar hasil pertanian yang diperoleh dijual sebagai bahan baku tanpa nilai tambah yang berarti seolah-olah telah mengalami transformasi. Keuntungan yang lebih tinggi diperoleh oleh pedagang dan pengumpul hasil pertanian, sehingga keuntungan petani berkurang. Akibat penurunan kontribusi sektor pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian dan penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, maka sektor tersebut tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Studi empiris oleh Udhar (2020) menunjukkan bahwa sektor sekunder berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja dan pendapatan per kapita di Sulawesi Selatan. Dengan demikian penurunan ketimpangan pendapatan karena terjadinya pergeseran struktur ekonomi yaitu menuju sektor industri. Sejalan dengan penelitian Sutiono & Syafitri (2018) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto sektor industri berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan sifat sektor industri yang padat karya untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan pendapatan yang lebih baik kepada pekerja dengan adanya upah minimum regional.

Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan penelitian Istiqamah *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia artinya pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi tidak disumbangkan secara merata oleh setiap warga negara dan tidak digunakan untuk meningkatkan

pengeluaran di daerah untuk penciptaan lapangan kerja, sehingga tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Studi empiris oleh Syilviarani & Hasmarini (2017) dan Dwiputra (2018) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi berkembang dengan baik, dan produktivitas ekonomi meningkat, maka dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di setiap provinsi di Indonesia.

Temuan ini tidak sejalan dengan Danawati (2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Studi empiris oleh Sutiono & Syafitri (2018) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Timur, hal ini disebabkan oleh distribusi keuntungan yang lebih besar bagi pedagang yang akan mengurangi keuntungan bagi para penghasil barang yang diperdagangkan khususnya dari sektor pertanian Jawa Timur.

Studi empiris oleh Nadya & Syafri (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, perekonomian daerah tersebut mengalami pasang surut setiap tahunnya, sehingga tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tidak dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah. Jika nilai pertumbuhannya positif, artinya perkembangan perekonomian pada periode tersebut baik, dalam jangka panjang berdampak baik terhadap perkembangan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan akan mendorong adanya

peningkatan kesempatan kerja, dan kemungkinan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

## **B. Perumusan Masalah**

Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan tetapi juga pada pengentasan kemiskinan, pemerataan masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2020 keadaan kesempatan kerja, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi. Peranan semua sektor dalam pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, keterbaharuan dalam penelitian ini adalah menjadikan 17 sektor pertumbuhan menjadi 3 sektor yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah PDRB sektor primer berpengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja di Indonesia?
2. Apakah PDRB sektor sekunder berpengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja di Indonesia?
3. Apakah PDRB sektor tersier berpengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja di Indonesia?
4. Apakah PDRB sektor primer berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
5. Apakah PDRB sektor sekunder berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
6. Apakah PDRB sektor tersier berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
7. Apakah PDRB sektor primer berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
8. Apakah PDRB sektor sekunder berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

9. Apakah PDRB sektor tersier berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

### **C. Pembatasan Masalah**

Ruang lingkup dalam penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto sektoral yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier terhadap variabel makro ekonomi di Indonesia yang meliputi tingkat kesempatan kerja, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan data observasi provinsi di Indonesia dari tahun 2010-2020.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis pengaruh PDRB sektor primer terhadap tingkat kesempatan kerja di Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh PDRB sektor sekunder terhadap tingkat kesempatan kerja di Indonesia.
- c. Menganalisis pengaruh PDRB sektor tersier terhadap tingkat kesempatan kerja di Indonesia.
- d. Menganalisis pengaruh PDRB sektor primer terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- e. Menganalisis pengaruh PDRB sektor sekunder terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- f. Menganalisis pengaruh PDRB sektor tersier terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- g. Menganalisis pengaruh PDRB sektor primer terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
- h. Menganalisis pengaruh PDRB sektor sekunder terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
- i. Menganalisis pengaruh PDRB sektor tersier terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini membuktikan apakah teori permintaan penawaran tenaga kerja dapat didukung melalui Produk Domestik Regional Bruto sektoral.
  - b. Penelitian ini membuktikan apakah teori lingkaran kemiskinan dapat diputus melalui Produk Domestik Regional Bruto sektoral.
  - c. Penelitian ini membuktikan apakah teori indeks gini dapat didukung melalui Produk Domestik Regional Bruto sektoral.
  - d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi pemerintah pusat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat.
  - b. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembangunan daerah.